

KONFLIK POLITIK PKS DAN MUHAMMADIYAH

Ari Nur Azizah dan Ma'arif Jamuin***

*Mahasiswa Prodi Tarbiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Political conflict of Muhammadiyah and PKS, invited writer to review it, which was concluded that political journey of PKS is more nuanced in political imagery. PKS is trying to appeal to the masses as much as possible to support the party. This effects rise to a conflict with the Muhammadiyah as an Islamic organization movement, because PKS entered the territory of Muhammadiyah considered unethical. PKS seeks to master Muhammadiyah assets for political purposes.

Keyword: Conflict, politics, organization

كان نزاع الجمعية المحمدية وحزب وحزب السياسى يدفع الباحث ان يبحثه بحثا، ومنه استنتب أن مسيره ذلك الحرب السياسى ياندونيسا يفضل النمثال السياسى ودعا الناس يدخلون هذا لذب افواجا وعديد اليؤيد واصعهم. وهذا الذى يسبب نزاعه بالجمعية المحمدية- وهى احدى الجمعيات الاسلامية، ودخل الحزب السياس دارها بدون سيرة حسنة- وحاول أن يستولى المؤسسات المحمدية لإجراء سياسنه.

الالفاظ الأساسية: نزاع السياسة، الجمعية الاجتماعية.

PENDAHULUAN

Politik memang dapat mengundang kontroversi terutama bagi mereka yang tidak memahaminya. Berbicara mengenai politik tidak da-

pat dilepaskan dari partai politik di Indonesia khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki gaya politik tersendiri. PKS merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang mengusung Islam sebagai ide-

ologi politiknya. Partai yang berbasis Islam ini menjadi partai yang cukup diperhitungkan di negeri ini yang sebagian besar penduduknya muslim. Berpijak pada landasan Islam sebagai sebuah tatanan ideologis, maka segenap unsur-unsur dalam agama menjadi alat untuk mencapai kepentingan politik yaitu kekuasaan. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara kepentingan politik dan kepentingan agama. Seiring berjalannya waktu, gaya politik yang dilakukan oleh PKS menimbulkan persinggungan dengan ormas Muhammadiyah meskipun Muhammadiyah bukan-lah sebuah partai politik. Persinggungan PKS dengan Muhammadiyah yang berawal dari masalah ideologi merambah ke persoalan politis. Fokus masalah yang akan penulis bahas yaitu seputar perjalanan PKS di kancah politik, Muhammadiyah di kancah politik, dan konflik politik yang ditimbulkan antara PKS dan Muhammadiyah.

PKS DI KANCAH POLITIK

Masa Reformasi setelah tumbangnya Rezim Orde Baru, kehidupan Negara Indonesia bersifat lebih demokratis. Di era tersebut tumbuh gejala politik baru berupa ledakan partisipasi politik rakyat yang luar biasa. Banyak elit politik berbondong-bondong membuat partai politik, tidak terkecuali bermunculan partai politik berbasis agama terutama Islam. Spirit agama dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan du-

kungan massa. Salah satu partai yang memanfaatkan instrumen agama sebagai alat kampanye politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam bidang politik, lahirnya PKS tidak bisa dilepaskan dari peranan Partai Keadilan. Hal ini bisa kita amati pada pemilu 1999, PK menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa ikut dalam pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang (Setiawan, 2004: 230). Melihat status PK sebagai gerakan mahasiswa, maka suara PK pada pemilu 1999 lebih disebabkan faktor eksklusivitas karena tidak mengandalkan basis massa dari arena yang lain.

PKS termasuk dalam kategori partai kader, yang mengedepankan mekanisme pengkaderan yang cukup ketat, eksklusif tetapi mempunyai ketepatan yang cukup valid dalam mencetak kader yang berkualitas. Kebanyakan kader dan simpatisan partai yaitu generasi muda, dunia kampus juga didominasi oleh partai politik ini. Kecenderungan tersebut memperlihatkan matangnya pengkaderan dan perhatian pada perekrutan anggota partai. Selain itu PKS selalu menunjukkan diri sebagai partai dakwah, partai yang peduli, dan banyak kegiatan yang berbau religius.

Partai ini adalah satu-satunya partai Islam yang selalu menunjukkan grafik prestasinya yang cende-

rung meningkat dalam sejarahnya selama mengikuti percaturan politik nasional sejak 1999. Dalam kampanye pemilu 2004, PKS menjadikan *sharia* sebagai latar belakang dan poin penting yang dijual pada publik. Platform perang terhadap korupsi, promosi keadilan dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dibawa menjadi agenda yang bisa diuji konsistensinya. Di tahun 1955, keseluruhan kelompok Islam membentuk Blok Piagam Jakarta yang mendorong hukum *shar-ia* dalam kampanye menjangkau pemilih. Di tahun 2004 hanya 23% yang mendukung *sharia* dan diantara 23% PKS memegang posisi terbanyak (Ismanto, 2005: 137). PKS menjadikan agenda politiknya bisa dinegosiasikan dengan kekuatan lain selain kelompok nasionalis. PKS tetap meletakkan strategi politik terbuka untuk menaikkan penawaran politiknya pada posisi jabatan publik bagi kader-kadernya. Agenda politik di atas dalam kacamata publik tentu membuat banyak orang menyukainya karena membawa unsur integritas dan komitmen yang tinggi. PKS yang eksklusif berubah menjadi inklusif untuk meraih suara yang banyak. Pada kampanye pemilu 2009, PKS tidak banyak menampilkan sikap politiknya dalam isu-isu penegakan *sharia* dan memposisikan dirinya terlibat lebih jauh dalam pedebatan yang lebih ideologis. PKS lebih memilih pendekatan pragmatis dengan harapan bisa memperluas dukungan dan basis konstituen. Fenomena ini disebut sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai politik. Da-

lam demokrasi yang sudah terinstitusionalisasi secara baik, ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antar partai akan semakin tidak jelas. Dengan kata lain, partai-partai politik akan semakin pragmatis dalam upayanya mendapatkan kekuasaan (Surbakti, 1992: 128).

Cara PKS mengorganisasi massa tidak bisa dilepaskan dari politik pencitraan sebagai parpol Islam masa depan. Sebagai partai dakwah PKS selalu mengambil momentum keagamaan untuk syiar agama sekaligus kampanye politik. Isu-isu kemanusiaan misalnya bencana alam, sengketa Palestina-Israel dan lain sebagainya menjadi cukup fungsional bagi partai tersebut. PKS selalu menonjolkan ikon perjuangan dengan simbol-simbol agama sehingga terjadinya manipulasi isu atau komodifikasi nilai-nilai ajaran agama demi kepentingan partai.

Politik pencitraan seperti yang dilakukan oleh PKS dapat dikategorikan sebagai bentuk dari perubahan ajaran Islam untuk mencapai kepentingan politik. sehingga hal tersebut menimbulkan tumpang tindih antara agama dan kepentingan politik.

MUHAMMADIYAH DI KANCAH POLITIK

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis sejak awal kelahirannya telah memilih jalan pergerakan di wilayah sosial-keagamaan dari pada di bidang politik.

Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam kancah perjuangan politik praktis yang memperebutkan kekuasaan dan lebih jauh lagi men-cita-citakan pembentukan sistem negara. Meskipun demikian, keterlibatan Muhammadiyah dalam kancah politik praktis dapat ditunjukkan dengan kedudukannya sebagai Anggota Istimewa dalam Masyumi sejak tahun 1945 hingga 1959 dan ketika Muhammadiyah membidani PMI pada awal Orde Baru (Nashir, 2000: 152-153). Tapi keterlibatan secara formal dan langsung itu tidak sampai menyeret Muhammadiyah untuk menjadi partai politik.

Belajar dari pengalaman sejarah yang berkecimpung dalam politik praktis, pada Muktamar Ujung Pandang tahun 1971 Muhammadiyah memutuskan untuk melepaskan diri dari keterkaitan dengan parpol manapun, tapi anggota-anggotanya diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada selama tidak merugikan Islam dan Muhammadiyah (Maarif, 2000: 87). Keputusan inilah yang dipegang sampai sekarang dan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah akan beranjak dari sikap yang demikian.

Muhammadiyah mengambil sikap netral sejak 1969, dimana pada tahun tersebut pendirian politik dicetuskan melalui tanwir Ponorogo yang membuat pedoman khittah Muhammadiyah (Jurdi, 2010: 199). Muhammadiyah menegaskan sikap netralnya terhadap partai politik dan

aspirasi politik warganya disalurkan melalui berbagai saluran yang tersedia termasuk melalui kader-kadernya yang aktif di partai politik. Muhammadiyah lebih memainkan peran politiknya dengan mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik kenegaraan. Dengan demikian, Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik dan tidak ada yang dlebihkan.

Muhammadiyah tidak memandang politik praktis itu tidak penting untuk dimasuki, tetapi tidak dengan melibatkan persyarikatan secara organisatoris. Hal ini cukup dilakukan oleh kader-kader yang berbakat saja yang terjun ke dalamnya dengan catatan agar mereka membawa misi dakwah Muhammadiyah dalam partai mana pun mereka berkiprah, yaitu doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* dijadikan acuan utama dalam berpolitik.

Pada saat Muhammadiyah dihadapkan pada partai-partai politik yang bermunculan pada era reformasi, sikap dasar Muhammadiyah tampak tidak berubah. Sesuai dengan khittah dan kepribadiannya, Muhammadiyah tetap ingin memelihara jati dirinya sebagai organisasi gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang tidak berafiliasi ke dalam dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik apapun (Nashir, 2000: 106). Dalam penjelasan Kepribadian Muhammadiyah disebutkan bahwa kendati bukan organisasi politik, Muhammadiyah tidak buta politik dan apabila urusan politik mendesak Muham-

madiyah maka Muhammadiyah akan bertindak dengan caranya sendiri (Nashir, 2000: 110).

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik dengan tidak menjadi partai politik menjadi kekuatan tersendiri. Muhammadiyah menjadi lebih memiliki bobot sebagai *moral force* dan *political force* yang memainkan fungsi sebagai kelompok kepentingan yang kuat karena didukung oleh massa yang relatif besar (Nashir, 2000: 3-4). Yang dimaksud kelompok kepentingan di sini adalah organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan negara atau pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik. Fungsi kelompok kepentingan tersebut seperti melakukan *lobbying*, memberikan dukungan atau penentangan atas kebijakan publik, dan kegiatan politik lainnya yang memberikan pengaruh pada proses politik tanpa berambisi dalam perebutan posisi politik di pemerintahan yang berbeda dengan fungsi partai politik.

Dalam pandangan Syafii Maarif, Muhammadiyah bersikap akomodatif (lentur) dalam menghadapi perkembangan politik di Indonesia. Konsep politik akomodatif tersebut berkenaan dengan perilaku politik yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan politik tanpa melanggar prinsip-prinsip yang menjadi pegangan organisasi ini, termasuk dalam kedekatan dengan pihak pemerintah (Nashir, 2000: 82). Muhammadiyah dengan sikap politiknya yang akomodatif lebih mengambil posisi dan peran yang

lentur serta menjauhi konfrontasi sejauh tidak bertentangan dengan idealisme gerakannya, sehingga Muhammadiyah relatif mudah diterima oleh banyak kalangan dalam kehidupan politik nasional.

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki corak dan watak kebangsaan dan nasionalisme yang kuat. Perbuatan yang bercorak nasionalistik telah menjadi wataknya sejak awal mula kebangkitannya. Muhammadiyah langsung bergerak untuk membenahi kultur umat terjajah melalui proses pencerahan dan kemanusiaan (Jurdi, 2010: xii). Sikap kritis Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah merupakan usahanya memperluas arena dakwah karena dakwah tidak hanya diorientasikan pada wilayah yang murni kultural, tetapi juga menyentuh wilayah negara, politik, dan birokrasi (Jurdi, 2010: 97).

Muhammadiyah akan selalu mengkritik pemerintah dan kebijakan-kebijakannya yang menyimpang, sebaliknya jika pemerintah benar, maka Muhammadiyah berada dalam pihak yang mendukungnya.

Seperti pengajuan *judicial review* UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Muhammadiyah, individu, dan ormas lainnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat serta merugikan rakyat Indonesia. Bagi Muhammadiyah, persoalan BP Migas adalah persoalan fundamental. Pengajuan

judicial review ini, dilakukan melalui kajian yang panjang sejak 2009-2010 oleh pakar-pakar Muhammadiyah.

Politik yang diterapkan Muhammadiyah untuk mengawal proses politik bangsa yaitu berpolitik tanpa memperhitungkan posisi dan kedudukan dalam kekuasaan. Demikian pula ketika mengoreksi sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Sehingga politik Muhammadiyah adalah politik yang dilandasi dengan akhlak mulia dan moral yang tinggi, hal ini juga merupakan bagian dari dakwah Muhammadiyah.

KONFLIK POLITIK PKS DENGAN MUHAMMADIYAH

Watak sebuah gerakan politik yang penuh dengan taktik dan politis banyak menimbulkan persinggungan antar gerakan politik dan ormas lain. Begitu juga dengan PKS dan Muhammadiyah, meskipun PKS merupakan sebuah partai politik sedangkan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi massa, sering terjadi persinggungan di antara keduanya. Hal ini terjadi dikarenakan banyak aktifis PKS yang memakai fasilitas Muhammadiyah untuk tujuan politik, seperti memanfaatkan amal usaha, masjid, lembaga pendidikan, dan fasilitas lainnya. Aktivitas PKS di tubuh Muhammadiyah yang mengatasnamakan dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, telah digunakan untuk kepentingan politik (Wahid, 2009: 180). PKS berusaha untuk me-

raup massa dari Muhammadiyah dalam rangka mendukung partainya. Sebenarnya PKS dipersilakan untuk memperoleh dukungan dari anggota Muhammadiyah, tetapi etika yang dilakukan PKS dengan masuk ke tubuh Muhammadiyah menjadi titik persinggungan di antara keduanya (Wahid, 2009: 181).

Konflik yang terjadi misalnya masalah perebutan masjid Muhammadiyah oleh PKS yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. PKS dalam melakukan strategi direncanakan dengan matang, terjadwal, termonitor, dan terkoordinir, sehingga bukan terjadi secara spontan dan serabutan. Dalam masalah perebutan masjid, kader PKS pertamanya meramaikan kegiatan masjid tersebut. Sebagaimana pada umumnya masjid kampung dipimpin oleh seorang kyai lokal yang mengadakan pengajian atau majlis ta'lim bagi penduduk. Untuk mencapai maksudnya, kader tadi mengajak kader PKS yang lain untuk meramaikan masjid sambil memperhatikan pola kepemimpinan sang kyai. Setelah dirasa cukup pengamatannya, mereka melakukan komunikasi dengan kyai menawarkan bantuan untuk mengkoordinir kegiatan yang lebih luas. Maka sejak saat itu Koordinator Kegiatan Majelis, Pengisi Acara, Pengurus

Masjid pun diubah menjadi Wajah PKS yang mencatat nama Salafi/Sunni.

Propaganda dan Kaderisasi pun diperlebar wilayahnya ke Masjid tersebut.

Misalnya kasus perebutan Masjid Al-Muttaqun di Prambanan pada 2006. Kasus ini pun melibatkan sosok Hidayat Nur Wahid, tokoh PKS yang juga aktivis Muhammadiyah. Al-Muttaqun adalah nama sebuah masjid yang tadinya secara tradisional dikelola Muhammadiyah. Tapi, pasca-gempa bumi di Yogyakarta pada Mei 2006, masjid itu terkenal justru karena jadi ajang pertempuran politik Muhammadiyah versus PKS. Masalah dimulai ketika PKS membuka posko gempa di dekat Masjid Al-Muttaqun. Tapi posko kemanusiaan itu kemudian berkembang jadi tempat rekrutmen kader PKS, lewat aktivitas "mabit" (malam bina iman dan takwa) serta liqo. Mabit dan liqo adalah aktivitas keagamaan semacam mentoring. Bisa juga dibilang semacam majelis taklim versi mini. Karena itu, acara tersebut diadakan di masjid. Namun mabit dan liqo PKS biasanya juga memasukkan agenda visi dan misi partai. Ini terjadi karena memperjuangkan Islam kerap dimaknai tidak bisa melepaskan diri dari politik praktis. Kemenangan PKS dalam perebutan Masjid Al-Muttaqun makin terlihat ketika kian banyak aktivis PKS (yang juga aktivis Muhammadiyah) duduk dalam kepengurusan takmir masjid. Puncaknya, status pengelolaan Masjid Al-Muttaqun dialihkan ke sebuah yayasan bernama Yayasan Al-Muttaqun, dengan Hidayat Nur Wahid sebagai ketua dewan pembinanya (Basfin Siregar dalam Lestari Blog).

Persinggungan politik PKS tidak hanya terjadi di masjid, tapi juga di

kampus-kampus Muhammadiyah. Meskipun kampus tersebut adalah kampus Muhammadiyah, tapi tidak semua orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang Muhammadiyah. Banyak dosen yang membawa ideologi masing-masing dan berusaha menyebarkannya di kampus Muhammadiyah. Di tingkat mahasiswa, juga banyak yang tidak sealign dengan Muhammadiyah. Seperti halnya organisasi-organisasi kampus mahasiswa, LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang dekat dengan PKS lebih menonjol dibandingkan dengan IMM. Begitu juga di UMS, mahasiswa lebih dekat dengan PKS karena kampus UMS didominasi oleh KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang merupakan sayap PKS (Wahid, 2009: 211). Di UMS juga terdapat kegiatan mentoring yang menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa semester 1 dan 2, dan sertifikat kegiatan tersebut menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah tertentu.

Selain masalah-masalah di atas PKS juga menuai kontroversi terkait dengan iklan politiknya yang menampilkan gambar KH. Ahmad Dahlan. Menanggapi penggunaan foto KH Ahmad Dahlan di iklan PKS tersebut, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta iklan itu ditarik karena penggunaannya tidak memberitahukan dan juga tidak izin kepada Muhammadiyah. Ini bisa disebut menyalahi etika. Aksi yang dilakukan oleh PKS tersebut sarat dengan kepentingan politiknya dan dianggap merugikan persyari-

katan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan politik PKS di Indonesia lebih bernuansa pada politik pencitraan. PKS lebih berusaha untuk menarik massa se-

banyak-banyaknya untuk mendukung partainya. Hal ini menimbulkan konflik dengan Muhammadiyah yang merupakan sebuah ormas Islam, karena PKS masuk ke wilayah Muhammadiyah dinilai tidak menggunakan etika yang baik. PKS berusaha untuk menguasai aset-aset Muhammadiyah untuk kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismanto, Legowo. 2005. *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*. Jakarta: Galang Press Group.
- Jurdi, Syarifudin. 2010. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashir, Haedar. 2000. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Maarif, A. Syafii. 2000. *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Islam dan Politik*. Jakarta: Pustaka Cesindo.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawan, Bambang, dan Nainggolan, Bestian, ed. 2004. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.
- Wahid, Abdurrahman (ed.). 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: the Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Maarif.
- Basfin Siregar, dalam <http://www.lestari.info/2013/01/membaca-ulang-seabad-muhammadiyah.html>.